

Filantropi Islam dan Aktivisme Sosial Berbasis Pesantren di Pedesaan

Hilman Latief

Jurusan Muamalah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Email: h_latief@umy.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the extent to which pesantren in a rural area finances its activities and operates social programs by revitalizing Islamic philanthropic scheme. By way of a case study in a village at Kulonprogo District-Yogyakarta, where a small Muhammadiyah pesantren, which is Darul 'Ulum, has been operating since the 1930s, this article suggests that the ability of this pesantren in engaging the villagers in religious and social activities has made this pesantren survives until now. Unlike other pesantrens, notably in urban areas, pesantren Darul 'Ulum functions as an educational institution that provides an opportunity to thus students coming from low-income households, including orphanages to study. This paper asks to what extent a small pesantren in a rural area can resolve its budget constrains, how community supports and the culture of giving can, or cannot, underpine pesantren's social and educational activities, and what sort of challenges for this pesantren to increase its institutional capacity?

Keywords: pesantren, philanthropy, community initiatives

ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan bagaimana pesantren yang berlokasi di daerah pedesaan membiayai aktivitas-aktivitas dan melakukan program-program sosial dengan merevitalisasi skema filantropi Islam. Dengan mengambil kasus di sebuah desa di Wilayah Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta, dimana sebuah pesantren kecil milik Muhammadiyah berdiri sejak tahun 1930an, artikel ini menyatakan bahwa kemampuan pesantren dalam melibatkan masyarakat setempat di mana pesantren itu berada dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan menjadi salah satu penyebab mengapa pesantren ini masih bisa bertahan hingga kini. Tidak seperti pesantren-pesantren lainnya, terutama yang berada di daerah perkotaan, pesantren Darul Ulum berfungsi sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menyediakan kesempatan kepada para santri yang berasal dari kalangan tidak mampu, termasuk yatim piatu untuk mendapatkan akses pembelajaran. Artikel ini merumuskan dalam konteks seperti apakah sebuah pesantren kecil di pedesaan dapat menyelesaikan kendala finansialnya, bagaimana dukungan masyarakat dan tradisi memberi dapat, atau tidak dapat, menjadi penyangga aktivitas sosial dan keagamaan pesantren, dan tantangan seperti apakah yang dihadapi pesantren dalam meningkatkan kapasitas institusinya?

Kata kunci: pesantren, filantropi Islam, inisiatif masyarakat

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan institusi sosial dan pendidikan Indonesia yang eksis jauh sebelum institusi pendidikan modern lainnya berdiri. Di Indonesia, pendidikan modern bergaya Eropa mulai diperkenalkan pada masa

kolonial, khususnya ketika Pemerintah Hindia Belanda menguasai wilayah Nusantara dalam kurun waktu yang cukup lama, sejak abad awal ke-17 sampai pertengahan abad ke-20. Pesantren, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan institusi pendidikan modern, hingga saat ini masih menjadi institusi pendidikan alternatif yang sebagian masih mempertahankan ciri tradisional, sementara sebagian lain sudah termodernisasi dan terintegrasikan dengan sistem dan kebijakan pendidikan modern.¹ Dewasa ini, fungsi dan peran pesantren telah membawa dampak perubahan sosial dan budaya yang tidak sedikit di masyarakat.² Selain perannya sebagai institusi pendidikan, banyak pesantren yang juga melakukan diversifikasi program dengan membentuk sentra-sentra produktif dan institusi yang bervisi *profit centers* untuk membangun dan menguatkan peran sosial dan ekonomi yang diembannya, seperti pendirian koperasi, BMT, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Di Indonesia pesantren memiliki bentuk yang beragam dilihat dari ukuran dan kapasitasnya, afiliasi keagamaannya, maupun visi sosial-politiknya. Pertama, bila menggunakan pembagian yang dilakukan oleh Zamachsyari Dhofier, terdapat setidaknya tiga kriteria pesantren dari segi kapasitasnya. Kriteria pesantren besar yang dilansir Dhofier adalah pesantren yang memiliki banyak santri, sampai mencapai ribuan, misalnya Pondok Pesantren Gontor atau Lirboyo. Di seluruh Jawa, begitu menurut Dhofier, orang biasanya membedakan kelas-kelas pesantren dalam tiga kelompok, yaitu pesantren kecil, menengah, dan pesantren besar. Pesantren yang tergolong kecil biasanya mempunyai

santri di bawah 1000 dan pengaruhnya terbatas pada tingkatan kabupaten. Pesantren menengah biasanya mempunyai santri antara 1000 sampai dengan 2000 orang, memiliki pengaruh dan menarik santri-santri dari beberapa kabupaten. Pesantren besar biasanya memiliki santri lebih dari 2000 orang yang berasal dari berbagai kabupaten dan provinsi.³

Kedua, seiring dengan eksistensi dan menguatnya organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia yang juga mendorong perkembangan pesantren, maka pesantren dapat dibagi menjadi beberapa jenis: pesantren yang berafiliasi kepada ormas-ormas keislaman, seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, dan sebagainya. Pesantren-pesantren yang berafiliasi pada ormas biasanya memiliki misi, visi, karakter dan corak ajaran yang sesuai dengan ormas-ormas tersebut. Sementara itu, saat ini juga berkembang pesantren-pesantren yang secara kasat mata tidak berafiliasi kepada ormas-ormas yang dikenal di Indonesia dan corak keagamaannya relatif berada di 'jalan tengah' yang mengadopsi dan tidak memformalkan sebuah mazhab tertentu. Selain dua jenis pesantren sebelumnya, pesantren salafi adalah corak lain yang secara ideologis memiliki karakteristik tersendiri.

Ketiga, visi sosial-politik pesantren adalah sisi lain yang dapat diungkap di sini. Meskipun fungsi inti dari sebuah pesantren adalah pendidikan, namun ekspansi dan perannya di masyarakat kadang lebih dari sekedar itu. Bagi pesantren-pesantren tertentu, visi sosial dibangun seiring dengan kebutuhan pesantren itu sendiri dan masyarakat di sekitar pesantren. Dari segi ekonomi misalnya, beberapa pesantren

modern mulai mengembangkan diri dengan membentuk sentra ekonomi yang melibatkan banyak pihak, yakni santri, masyarakat sekitar, dan juga pengusaha dan pemerintah. Tentu saja, pembagian jenis atau karakter pesantren seperti di atas tidak dipahami secara rigid sebab kadang terjadi interseksi dari klasifikasi tersebut.

Eksistensi dan sustainabilitas perekonomian sebuah pesantren ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: respons dan minat masyarakat terhadap pesantren tersebut yang dapat dilihat dari jumlah santrinya, besarnya kontribusi finansial masyarakat melalui berbagai bentuk donasi yang diberikan kepada pesantren, dan peran pesantren itu sendiri dalam menjaga dan mengembangkan dimensi profit centers-nya. Yang selanjutnya akan ditekankan pada buku ini adalah bahwa sebagai institusi keagamaan, hampir seluruh pesantren melibatkan peran umat baik langsung maupun tidak, seperti masyarakat, pengusaha, dan pemerintah dalam melakukan penguatan kapasitas institusinya.

Manfred Ziemek dalam *Pesantren dalam Perubahan Sosial* menegaskan bahwa nama dan pengaruh sebuah pesantren berkaitan erat dengan masing-masing kiai. Hal itu telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian seorang pemimpin pesantren menentukan kedudukan dan tingkat suatu pesantren. Bila pada saat pendirian sebuah pesantren, kepemimpinan dan kecakapan seorang kiai menggerakkan massa merupakan faktor menentukan, untuk mengajak penduduk sekitarnya bekerja dan turut serta dalam pembiayaan, selanjutnya seorang kiai sering dapat membangun peran strategisnya sebagai pimpinan masyarakat yang non formal melalui suatu komunikasi

yang intensif dengan penduduk.⁴ Dalam taraf tertentu, seorang Kiai mampu melakukan mobilitas sosial di lingkungannya sehingga menarik simpati jemaah dan ummat guna menyumbangkan sebagian harta benda mereka dalam bentuk infak, shadaqah, dan wakaf kepada pihak pesantren. Buku ini mengeksplorasi visi dan kebijakan filantropi di beberapa pesantren yang dianggap mewakili pesantren lainnya dalam konteks kemampuan memetakan sumber daya derma, merumuskan model fundraising, dan mengelola harta derma tersebut untuk sustainabilitas pesantren dan sekaligus mengembangkan program kemasyarakatan.

Dalam sebuah acara bertajuk “Lokakarya Desain Kelompok Usaha Kecil Bersama” yang dihadiri oleh perwakilan pesantren, Dediknas, dan Permodalan Nasional Madani tentang pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2004, tercermin bahwa pesantren sesungguhnya memiliki potensi besar untuk berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Sebagaimana diliput Kompas, 29 September 2004, bahwa “sebagai pranata sosial yang berakar di masyarakat lapisan bawah, pesantren sangat potensial digerakkan sebagai gerbong perekonomian bangsa.” Namun demikian, “pertautan antara pesantren dan masyarakat sekitarnya secara ekonomi belum memberikan pengaruh berarti.” Hal itu disebabkan karena kebanyakan pesantren belum memiliki visi untuk mengarahkan lulusannya di bidang kewiraswastaan. Dalam konteks ini, konsep tentang derma dan kedermawanan tidak bisa dilepaskan dari tradisi Islam. Masyarakat atau umat memiliki relasi yang bersifat dialektis dengan sebuah pesantren. Pesantren didirikan mengandalkan kontribusi ummat

di satu sisi, dan ummat pun berharap bahwa pesantren dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk bimbingan moral semata, melainkan dalam hal-hal lain yang bersifat produktif. Ketika bangsa Indonesia ini memasuki saat-saat krisis, maka peran pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren bukan saja mungkin, tetapi juga sudah tidak bisa diabaikan lagi.

Tulisan ini menelaah wacana dan praktik filantropi Islam berbasis pesantren, dengan mengkaji pesantren yang berada di pedesaan. Tema ini tidak dikhususkan pada pengembangan ekonomi pesantren, tetapi kepada bagaimana pesantren mengelola dan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengembangan pesantren. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus tulisan ini antara lain: Bagaimanakah wacana dan praktik filantropi Islam dikembangkan dalam pesantren? Bagaimanakah pesantren di pedesaan membangun jaringan dengan institusi luar dalam rangka memperkuat kapasitas institusinya dan sumber finansialnya? Bagaimana pula pesantren menjaga hubungan timbal-balik dengan masyarakat sekitar dan institusi swasta lainnya dalam konteks penguatan masyarakat sipil di Indonesia?

PESANTREN: MASALAH PENGABDIAN DAN PEMBIAYAAN

Harapan bahwa pesantren dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar nampaknya tidak pernah surut. Hal itu muncul karena secara historis, seperti dikemukakan pada bagian berikutnya, pesantren sesungguhnya mewakili salah satu bentuk lembaga pendidikan berbasis komunitas. Banyak lahan yang ditempati

pesantren juga berasal dari tanah wakaf, begitupun bangunan pondoknya, juga melibatkan banyak donatur yang bersimpati terhadap lembaga pendidikan ini. Oleh karena itu, bagi sebagian kalangan, pesantren memiliki pula tanggung jawab sosial yang cukup besar bagi sekitarnya. Apalagi biaya pendidikan di pesantren dewasa ini kadang tidak jauh lebih murah dibanding sekolah-sekolah lainnya. Lili Zakiyah Munir, direktur Center for Pesantren and Democracy Studies, memetakan beberapa persoalan dan langkah normatif yang terkait antara pesantren dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam proyek pengentasan kemiskinan.

Pertama, pesantren sejatinya dapat meningkatkan 'ghirah kemanusiaan'. Masalah kesederhanaan, keikhlasan, konsep egalitarian, sikap saling tolong menolong, bukan saja dipraktikkan di lingkungan sendiri, tetapi juga bisa di bawa keluarga institusi pesantren. Kedua, kiai dan pengasuh pesantren harus dapat berperan ganda, bukan saja sebagai panutan dan pembina santri, tetapi juga panutan dan pembina masyarakat sekitar. Ketiga, Perlunya penggeloraan semangat keikhlasan dengan tidak terlalu silau dengan iming-iming material atau finansial yang bisa membelokkan idealisme pesantren. Keempat, 'mengembalikan semangat non-partisan' dalam melayani masyarakat. Keterlibatan banyak kiai dalam 'politik praktis' bukan saja telah menciptakan polarisasi di kalangan para kiai, tetapi juga mereduksi semangat untuk membantu masyarakat sekitar. Kelima, perlunya peningkatan wawasan tentang ekonomi makro (kapitalisme) yang juga mengakibatkan kemiskinan di masyarakat akibat lemahnya kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Sehingga, kiai dan lembaga serta

jaringannya dapat memberikan alternatif bagi pemberdayaan masyarakat sekitar yang menjadi korban kebijakan tersebut. Terakhir, perlunya kesadaran kritis agar pesantren dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya, termasuk kemampuan yang dimiliki pesantren dalam mengelola harta-harta derma yang berasal dari masyarakat, seperti zakat, infak shadaqah dan wakaf (ZISWAF).⁵ Langkah-langkah normatif tersebut nampaknya sebuah formula yang ideal bagi pesantren untuk dapat berperan lebih jauh di masyarakat, baik dalam agenda pemberdayaan maupun pengentasan kemiskinan. Namun, persoalan di lapangan lebih kompleks. Jangankan menyentuh gerakan pemberdayaan, persoalan komunikasi antara pesantren dengan warga sekitar kaang atau sering tidak selalu harmonis. Hal itu jelas berdampak pada sendi finansial pesantren yang berasal dari masyarakat.

Kekhawatiran semacam itu bukan hanya milik Zakiyah Munir, sejak beberapa tahun silam beberapa tokoh seperti Gus Dur, M. Dawam Rahardjo, Mansoer Faqih, Masdar F. Mas'udi dan lain-lain sudah menunjukkan keprihatinan yang sama. Karena itulah pada tahun 1980an, sosok-sosok tersebut menggagas berdirinya P3M, yang khusus mengangkat isu pemberdayaan pesantren dan yang terkait dengannya. Gus Dur mensinyalir bahwa sejak beberapa dasawarsa ke belakang telah terjadi apa yang disebut dengan 'erosi nilai' dari pesantren-pesantren yang ada yang kini lebih berorientasi pada ijazah. Hal ini disebabkan bahwa sendi finansial yang berasal dari masyarakat semakin menipis dan karena itu mereka juga bisa menghindari sikap yang menjadikan pendidikan sebagai sebuah komoditas guna

memenuhi tuntutan kebutuhan operasional pesantren. Oleh karena itu, banyak pesantren kemudian yang 'banting setir' dari upaya mencetak kiai atau ulama dengan menawarkan program-program keterampilan lain yang dapat mengancam eksistensi kiai sendiri. Tentunya, sebagaimana ditekankan Gus Dur, mengajarkan materi-materi pelajaran diluar materi pelajaran agama adalah sesuatu hal sangat positif, meski demikian, hal itu juga memiliki konsekuensi tersendiri, yaitu pesantren tidak ubahnya seperti lembaga pendidikan formal lainnya yang tidak memiliki ke *khas-an*. Hal itu bisa dilihat dari beberapa segi, mislanya dari segi, ekonomi yang tidak lagi mengoptimalkan kontribusi masyarakat, melainkan mengoptimalkan iuran bulanan santri; dari segi pendidikan juga tidak jauh berbeda dengan sekolah formal konvensional hanya ditambah dengan asrama. Terkait dengan pelajaran keterampilan di pesantren, Gus Dur menulis:

*Pendekatan semacam ini bagi saya hanya bersifat parsial bahkan mungkin manipulatif. Samar-samar terlihat bahwa hasrat pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bercampur dengan pamrih agar mereka pada gilirannya akan menyediakan landasan ekonomi bagi pesantren sendiri. Atau jika hendak dipertegas pesantren bergelagat hendak memanfaatkan kesulitan masyarakat demi kepentingannya sendiri.*⁶

Dalam pernyataan tersebut Gus Dur bukanlah merepresentasikan sebagai sosok yang menolak masuknya ilmu-ilmu umum dan keterampilan ke dalam pesantren. Sebab dalam beberapa tulisan lain ia menyadari bahwa pesantren harus berhadapan dengan modernitas dan melakukan penyesuaian-

penyesuaian. Pergeseran dari masyarakat agraris/feodal ke masyarakat industri/modern telah meniscayakan pergeseran-pergeseran dalam pesantren terjadi. Gus Dur juga misalnya menyatakan bahwa salah satu parasyarat utama bagi proses dinamisasi pesantren adalah adanya “rekonstruksi bahan-bahan pengajaran ilmu-ilmu agama dalam skala besar-besaran...dengan tetap tidak meninggalkan pokok-pokok ajaran keagamaan yang kita warisi selama ini.”⁷

Ketika merumuskan tanggung jawab sosial pendidikan, para pengamat nampaknya membangun asumsi dan harapan berbeda dibanding dengan asumsi dan harapan mereka terhadap sekolah formal lainnya, seperti SLTP/Tsanawiyah atau SLTA/SMU/ Aliyah. Harapan lebih besar dibebankan di pundak pesantren, agar institusi keislaman tersebut dapat menunjukkan tanggung jawab sosialnya secara lebih kongkret di masyarakat. Tanggungjawab sosial disini dimaknai oleh beberapa pemerhati sebagai upaya memenuhi kebutuhan santri dan masyarakat sekaligus, baik pada aspek edukasi, keagamaan, maupun sosial dan ekonomi. Namun lagi-lagi manifestasi tanggungjawab sosial pesantren seringkali dihadapkan pada—atau berbenturan dengan—kapasitas finansial yang dimiliki oleh pesantren. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa orang-orang menaruh ‘beban’ tanggungjawab sosial pesantren lebih besar dari sekolah lainnya?

Sebagaimana telah diutarakan pada bagian sebelumnya, pesantren maupun lembaga pendidikan lainnya memiliki beberapa fungsi selain dari fungsi edukasi, yaitu fungsi sosial. Tentu, pemaknaan fungsi sosial bagi sebuah pesantren harus didefinisikan secara lebih luas, yang tidak semata pemberdayaan di bidang ekonomi

atau terbatas pada aspek material. Kesuksesan melakukan fungsi tersebut sangat tergantung kepada kondisi internal pesantren itu sendiri. Bila sebuah pesantren ditopang oleh sendi perekonomian yang kuat, baik yang berasal dari usaha mandiri maupun kontribusi dari institusi luar, maka sudah sewajarnya pesantren mampu melakukan penguatan ekonomi di sekitarnya. Sebaliknya, bila pesantren tersebut tidak kuat secara ekonomi, maka ekspresi tanggung jawab sosialnyapun bisa lebih luas, misalnya, melakukan pembinaan keagamaan kepada masyarakat sekitar dan mendukung kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks seperti itulah, diskusi filantropi Islam berbasis pesantren menjadi relevan. Filantropi biasanya dimaknai sebagai bentuk ‘kedermawanan’ yang bertali temali dengan tradisi memberi. Pada umumnya, pesantren adalah sebuah institusi yang berasal dari ‘pemberian’ seorang kiai bersama warga masyarakat, baik itu tanah yang digunakannya maupun dana pembangunannya. Dulu, masyarakat memberikan dermanya, baik yang berasal dari infak, zakat dan shadaqah, kepada tokoh-tokoh agama, modin, penghulu dan kiai. Di beberapa tempat, tradisi ‘memberi’ semacam itu masih berlangsung. Di Indonesia sendiri pemanfaatan dana zakat, sadakah, infak, dan wakaf (ZISWAF) juga semakin beragam. Sebagian institusi pengelola dana zakat dan sadaqah atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudah mencoba pemanfaatan dana dari masyarakat melalui program-program yang lebih memperhatikan unsur sustainibilitasnya. Pesantren sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan yang multi-fungsi. Beberapa pesantren ikut berperan sebagai pengelola (‘amil) dana zakat dan

sadaqah, tetapi pesantren-pesantren lainnya justru menjadi 'penerima'. Di kalangan masyarakat pedesaan, tradisi berderma dengan memberikannya kepada tokoh tertentu masih ada, hal itu dilakukan untuk menghormati kerja keras dan pengabdian para kiai, dan juga sebagai kepedulian mereka untuk menyokong lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren. Kedua bentuk peran yang dapat dimainkan pesantren, baik sebagai amil (pengelola) ataupun penerima dana ZISWAF, juga tidak mudah. Sebab semua itu tergantung juga bagaimana pola kedekatan sebuah pesantren dan orang-orang di dalamnya dengan masyarakat sekitarnya.

Dalam studi filantropi berbasis pesantren, ada beberapa hal yang bisa dicermati. Pertama mengenai sumber daya derma yang berasal dari masyarakat. Tak pesantren pada mulanya merupakan pendidikan pendidikan berbasis komunitas. Masyarakat memberikan kontribusi besar kepada pembangunan pesantren melalui berbagai cara, seperti, memberikan sumbangan berupa material dan non-material, membantu dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan pesantren. Kedua adalah model penggalan sumber daya dana. Pesantren bagaimanapun membutuhkan sumber-sumber pendanaan yang tidak sedikit untuk menutupi kebutuhan operasionalnya. Selain memperoleh dana dari dari iuran wajib santri, pesantren juga melakukan berbagai upaya, mencari sumbangan dari berbagai pihak, swasta maupun pemerintah, melakukan bisnis yang hasilnya dialokasikan untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar, serta memanfaatkan sumber dana lain yang berasal dari dana ZISWAF. Ketiga terkait dengan manajemen pengelolaannya. Saat ini

beberapa lembaga telah mengelola harta derma yang berasal dari masyarakat untuk dapat kembali dinikmati secara optimal oleh masyarakat lain yang membutuhkan.⁸

PESANTREN, FILANTROPI ISLAM, DAN MASYARAKAT PEDESAAN

Kegiatan perekonomian dan pendidikan di daerah pedesaan tidaklah semeriah di wilayah perkotaan. Kehidupan masyarakat pedesaan relatif lebih sederhana. Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggal di pedesaan umumnya tidak lebih tinggi dari orang-orang kota. Lembaga-lembaga pendidikannya terbatas sampai pada tingkat menengah atas, dan tidak banyak perguruan tinggi yang didirikan di desa-desa. Profesi atau pekerjaan sehari-hari masyarakat pedesaan lebih banyak bercocok tanam/bertani, meski sebagian dari mereka juga bekerja di kota. Kendatipun tingkat pendidikan mereka yang hidup didesa secara umum relatif lebih rendah di banding mereka yang hidup di wilayah perkotaan, penyelenggaraan kegiatan pendidikan keagamaan di pedesaan cukup baik dan antusias. Madrasah-madrasah dan masjid-majid menjadi pusat kegiatan pendidikan keagamaan. Bila dilihat dari pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan berbasis keagamaan Islam, bukan suatu hal yang baru bahwa kebanyakan lembaga tersebut, khususnya pesantren, justru pada mulanya berkembang di wilayah pedesaan. Beberapa pesantren besar, menengah maupun kecil justru juga lahir di wilayah pedesaan, dan pesantren itulah yang di kemudian hari memberikan andil dalam membesarkan nama desa-desa kecil itu.

Keterlibatan masyarakat dalam mendorong eksistensi institusi-institusi sosial di pedesaan juga cukup besar karena kohesi

sosialnya relatif lebih lekat ketimbang masyarakat kota yang cenderung lebih 'individualistis'. Namun, itu tidak selalu berarti bahwa masyarakat pedesaan dan institusi-institusi sosial di pedesaan selalu memiliki kemudahan dalam mengembangkan institusi pendidikan, termasuk institusi pendidikan keagamaan. Salah satu alasannya adalah karena adanya keterbatasan-keterbatasan dari segi perekonomian berikut jaringan-jaringan pendukungnya. Sehingga daya tumbuh institusi pendidikan di pedesaan juga relatif lebih lambat dari lembaga yang sama yang berada di perkotaan. Bagian ini, akan mengungkap kegiatan filantropi yang berbasis pesantren di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta, dan melihat bagaimana kegiatan filantropi tersebut diorganisasikan oleh masyarakat sekitar maupun di lingkungan pesantren itu sendiri, apa saja keterbatasan dan tantangan yang dihadapi pesantren di pedesaan, dan apakah zakat dan sadaqah memberikan kontribusi dalam penguatan institusi pesantren dan masyarakat.

PESANTREN DARUL ULMUM: BERAWAL DARI INISIATIF KEPALA DESA DAN MASYARAKAT

Pesantren Darul Ulum bukanlah pesantren besar, meski dilihat dari usianya, pesantren yang awalnya bernama madrasah Darul Ulum ini cukup 'berumur', didirikan pada 5 Juli 1932. Artinya berusia lebih dari setengah abad. Dulu, pesantren ini adalah sebuah madrasah biasa yang hanya menyelenggarakan pendidikan formal keagamaan di tingkat Menengah Pertama dan Menengah Atas. Saat ini, secara institusi, telah dibentuk sebuah yayasan bernama

Yayasan Darul Ulum yang membawahi pesantren dan sekolah-sekolah. Ada sekitar 400-an 'santri' atau siswa yang menuntut ilmu di tingkat Tsanawiyah (SLTP) maupun Aliyah (SMU). Jumlah ini dapat dikatakan lebih sedikit dibanding beberapa dekade sebelumnya, terutama di masa 'kejayaan' madrasah ini pada tahun 1970-an. Menurut salah seorang pengurus pondok, pada tahun 1970-an siswa-siswi yang belajar di Madrasah Darul Ulum dapat mencapai ribuan orang. Seiring dengan perkembangan institusi-institusi pendidikan yang baru dan sekolah-sekolah negeri, jumlah siswa yang belajar Darul Ulum pun semakin surut. Tidak seperti halnya pesantren-pesantren lain terutama yang berada di Jawa Timur dimana kebanyakan santri mondok/tinggal di asrama pesantren, para siswa pesantren Darul Ulum tidak seluruhnya mondok di asrama pesantren. Sebagian besar siswa, terutama mereka yang rumahnya dekat dengan pesantren, tidak tinggal di pondok, tetapi "dilaju" alias pulang-pergi dari rumah ke pondok setiap hari. Mereka tinggal di rumah keluarga masing-masing ketika malam hari, dan belajar di lembaga pendidikan Darul Ulum di siang hari. Jadi, para siswa yang tinggal di asrama milik pesantren adalah mereka yang tempat tinggalnya agak jauh dari pesantren.

Secara geografis, pesantren ini terletak di wilayah barat-daya Yogyakarta. Tepatnya di Pedukuhan XII Sewugalur, Desa Karang Sewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Terletak di arah Barat Daya Yogyakarta, Pesantren ini dapat ditempuh 1 jam dari atau berjarak sekitar 45 km dari kota Yogyakarta. Kabupaten Kulonprogo adalah kabupaten yang cukup besar secara geografis di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, meskipun pada tingkat perekonomian tidak semaju Kota Madya dan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tetapi Kulonprogo secara ekonomi relatif berada di atas Kabupaten Gunung Kidul dan setara dengan Kabupaten Bantul. Kebanyakan penduduk Pedukuhan XII Sewugalur bekerja sebagai petani atau bercocok tanam. Sebagian kecil anggota masyarakat berdagang atau bekerja di pasar untuk berjualan, sementara sebagian lain bekerja di kantor pemerintahan dan sebagai pegawai negeri sipil atau guru. Pekerjaan bercocok tanam tentunya telah dilakukan secara turun temurun selama puluhan atau mungkin ratusan tahun. Jalan menuju Madrasah ini diwarnai oleh areal pesawahan. Tekstur di daerah Kulonprogo pada umumnya naik turun, dan sebagian berbukit, tapi Pedukuhan Sewugalur ini terletak di daerah yang berdataran rendah, bukan perbukitan. Sehingga tanah di wilayah tersebut lebih subur dan cocok untuk ditanami padi atau palawija dengan mendapat pengairan yang cukup dari Kali Progo, sebuah sungai yang terbujur membelah Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul.

Saat ini pesantren Darul Ulum berada dalam naungan organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah. Secara historis pendiri pesantren Darul Ulum memang memiliki keterkaitan historis dengan organisasi modernis ini. Pasalnya, sang pendiri, Haji Dawam Roji adalah alumni Pesantren atau Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta, sekolah pertama yang didirikan Muhammadiyah pada awal abad ke-20 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Saat ini Madrasah Mualimin masih merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan cukup besar dan maju di dalam organisasi

Muhammadiyah. Namun, berbeda dengan Madrasah Mualimin yang saat ini berada di tengah pusat Kota Yogyakarta, Darul Ulum terletak di pedesaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa genealogi pesantren memiliki *pattern* tersendiri yaitu hubungan santri-kyai yang masih terpelihara. Sudah merupakan fenomena umum bahwa sebuah pesantren didirikan oleh mantan santri dari sebuah pesantren lain. Dan pesantren baru tersebut biasanya memiliki hubungan khusus dengan pesantren tempat mantan kyai (pendirinya) *nyantri*. Selain itu, pendirian pesantren Darul Ulum memang tidak terlepas dari aktivitas organisasi Muhammadiyah yang diantaranya difokuskan pada pendirian lembaga pendidikan. Pada tahun 1926, di daerah ini didirikan Sekolah Dasar Muhammadiyah sebagai prasyarat bagi pendirian Cabang Muhammadiyah. Setelah berdirinya Sekolah Dasar (SD Wonopeti), masyarakat dan pimpinan Muhammadiyah berfikir untuk mendirikan sekolah lanjutan. Kemudian muncullah inisiatif untuk mendirikan Madrasah di tingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Muhammadiyah juga memiliki hubungan emosional dengan pesantren Darul Ulum karena salah satu tokoh Muhammadiyah pada tahun 1970-an sampai awal 1990-an, K.H. AR. Fachrudin yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama beberapa periode, adalah salah satu alumni Madrasah Darul Ulum dan bahkan dikenal sebagai siswa yang pertama mendapatkan nomor induk siswa di sekolah tersebut.

Pada paruh ketiga abad ke-20, Haji Dawam Roji yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa berinisiatif untuk mendirikan sebuah pesantren yang dapat mendukung dinamika kehidupan bermasyarakat di

daerah tersebut. Ide tersebut kemudian mendapat dukungan dan dari sebagian anggota masyarakat. Posisi Haji Dawam sebagai Kepala Desa tentu saja memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pendirian pesantren ini, bukan saja secara politis tetapi juga secara ekonomis. *Pertama*, dia adalah figur yang memegang pengaruh di tingkat lokal. Sehingga, relatif lebih mudah baginya untuk mengkonsolidasikan dan mengorganisasikan agenda pendirian Darul Ulum dengan masyarakat setempat. *Kedua*, secara keagamaan dia juga seorang figur yang dihormati, karena merupakan alumni pondok pesantren Muallimin dan juga tokoh Muhammadiyah di Kulonprogo. *Ketiga*, dia memiliki jaringan yang pada saat itu cukup besar dalam merealisasikan programnya untuk mendirikan pesantren, setidaknya di tingkat lokal. Memang, secara organisatoris madrasah atau pesantren Darul Ulum dibawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen, Kulonprogo, tetapi secara historis tidak tumbuh dari Muhammadiyah. Hanya saja, sang pendiri yang memang tokoh Muhammadiyah setempat berfikir bahwa untuk menjaga sustainabilitas lembaga ini perlu ada sebuah organisasi yang lebih paten. Dia khawatir anaknya belum tentu mau mengurus pesantren di suatu saat nanti. Karena itulah ia memutuskan pesantren ini 'diberikan' kepada Muhammadiyah.

Secara kelembagaan, Madrasah Darul Ulum juga tidak mengecewakan karena beberapa prestasinya dan kontribusinya baik kepada Muhammadiyah maupun kepada insan pendidikan di daerah tersebut. Bagi Muhammadiyah sendiri, Madrasah Darul Ulum dipersiapkan sebagai arena untuk mendidik kader-kader mubaligh dan guru

agama. Karena itu pada tahun 1937, Madrasah ini disebut juga Sekolah Guru Agama (SGA) Darul Ulum yang masa belajarnya 3 tahun. Selanjutnya pada tahun 1951, masa belajar di SGA ini adalah 4 tahun (Pendidikan Guru Agama Pertama/PGAP), dan pada masa berikutnya menjadi 5 dan 6 tahun (Pendidikan Guru Agama Atas). Pada tahun 1951 itulah Madrasah ini juga mendapatkan status penyeteraan dari Departement Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baru pada tahun 1977, statusnya berubah menjadi Tsanawiyah dan Aliyah. Sejak 3 tahun lalu, Madrasah Darul Ulum ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan 'kelas jauh' Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/SMK. Hal itu dilakukan karena di daerah tersebut belum ada SMK, sementara minat siswa untuk belajar di lembaga kejuruan relatif tinggi dibanding sekolah di madrasah. Untuk memfasilitasi minat siswa di daerah tersebut maka dilakukan kerjasama antara dinas pendidikan setempat dengan Yayasan Darul Ulum untuk menyelenggarakan pendidikan kejuruan. Untuk mata pelajaran umum, gurunya diambil dari sekolah setempat, sementara untuk mata pelajaran kejuruan, didatangkan dari sekolah-sekolah negeri.

Seperti juga pesantren di pedesaan lain pada umumnya, tanah tempat berdirinya pesantren berawal dari tanah wakaf, sebagian anggota masyarakat mewakafkan tanah pekarangan mereka, sebagian yang lain mewakafkan tanah pesawahan. Luas area pesantren Darul Ulum saat ini mencapai 2 hektar, namun lokasinya terpisah-pisah. Tanah-tanah wakaf yang dimiliki pesantren tidak seluruhnya dipergunakan untuk bangunan pesantren atau dijadikan sebagai sarana dan prasarana belajar mengajar.

Melainkan juga digunakan untuk usaha yang mendukung kelangsungan kegiatan pesantren, misalnya dengan ditanami pohon jati agar hasilnya suatu saat bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Madrasah Darul Ulum yang terdiri dari tingkat Tsanawiyah dan Aliyah berada di lokasi yang berdekatan, hanya dipisahkan oleh sebuah lapangan sepak bola milik desa setempat. Pada mulanya, area lapangan sepakbola tersebut milik seorang warga. Namun karena banyak difungsikan untuk kegiatan kemasyarakatan, termasuk olah raga, dan posisinya diapit oleh dua sekolah (Tsanawiyah dan Aliyah Darul Ulum), masyarakat menghendaki agar dilahan tersebut tidak didirikan bangunan. Saat ini, Madrasah Darul Ulum menjadi semacam Kompleks Perguruan Muhammadiyah, ada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Tsanawiyah dan Aliyah. Di sebelah utara sekolah terdapat PKU Muhammadiyah, sebuah klinik kesehatan yang menjadi rujukan masyarakat setempat. Jadi, seluruh institusi sosial baik di bidang pendidikan dan kesehatan di kompleks tersebut berada di bawah Muhammadiyah. PKU Muhammadiyah secara organisatoris tidak terkait langsung dengan madrasah, tetapi keduanya, baik sekolah maupun klinik tersebut, adalah milik Muhammadiyah. Ada konsekuensi yang menarik dari fenomena tersebut yaitu bahwa para guru, siswa dan pengurus pondok pesantren mendapatkan potongan atau harga khusus ketika mereka berobat ke PKU Muhammadiyah. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk kontribusi Muhammadiyah dalam membangun sistem 'kesejahteraan' bagi para pengajarnya.

PKU Muhammadiyah tersebut bukanlah satu-satunya klinik kesehatan di desa tersebut,

tetapi sarana dan prasarana yang disediakan PKU Muhammadiyah di Sewugalur ini lebih lengkap daro Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat milik pemerintah). Ketersediaan dokter juga relatif baik, dan para perawat jumlahnya juga cukup banyak sebab banyak calon-calon perawat dari Akademi Keperawatan, khususnya yang didirikan oleh Muhammadiyah, ikut magang di PKU ini. Meski demikian, sebagai sebuah klinik kesehatan PKU Muhammadiyah tersebut hanya menangani penyakit-penyakit yang ringan saja, dan berperan memberikan rujukan ke rumah sakit lain bila mendapatkan pasien yang menderita penyakit agak berat, seperti patah tulang yang memang memerlukan penanganan khusus.

ANTARA PESANTREN, MADRASAH, SEKOLAH DAN PANTI ASUHAN

Sejak tahun 2003, Madrasah ini merintis pendirian pondok pesantren. Ada puluhan siswa yang ikut nyantri di pesantren. Dari ratusan santri yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Darul Ulum, hanya puluhan saja yang tinggal di asrama. Sejak tahun 2003-2007, mereka yang tinggal di asrama berkisar 30-50 santri. Terutama mereka yang tinggal agak jauh dari lokasi dan juga sebagian orang-orang yang tidak mampu. Karena itu pesantren tersebut juga menjadi panti asuhan sekaligus, yang bernama Darul Marhum. Jadi, pesantren Darul Ulum memerankan dua fungsi sekaligus: pertama sebagai pondok pesantren tempat para santri belajar mata pelajaran keagamaan di luar sekolah di siang hari, kedua berperan sebagai panti asuhan yang menampung anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Latar belakang ekonomi siswa yang belajar di Darul Ulum

bermacam-macam. Tidak semua berasal dari keluarga orang berada. Sebagian berasal dari keluarga biasa saja yang setidaknya mampu membayar biaya sekolah anak-anak mereka, tetapi sebagian lain berasal dari keluarga tidak mampu. Menurut keterangan salah seorang guru, hampir 60% dari siswa mereka berasal dari keluarga tidak mampu alias tidak sanggup membayar penuh biaya pendidikan mereka. Beberapa keluarga siswa mengajukan permohonan keringanan untuk dapat membayar secara 'tidak penuh', dan karena itu walaupun mereka membayar iauran, jumlahnya tidak sama antara satu sama lain. Ada yang 100% sampai 50 %. Semua kontrak pembayaran tersebut hanya dihitung untuk biaya makan selama satu bulan saja. Sebagai sebuah sekolah yang berdiri di pedesaan sistem 'subsidi silang' sudah diberlakukan. Artinya kesadaran akan adanya disparitas sosial ekonomi sudah ada di benak pengurus pondok tersebut.

Lokasi asrama pondok pesantren Darul Ulum terpisah dari Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, berjarak sekitar 500 meter dari. Pada saat penelitian ini dilakukan, kondisi Pondok Pesantren Darul Ulum atau Panti Asuhan Marhumah itu belum sepenuhnya selesai dibangun. Kondisinya masih belum sempurna dan bangunannya sangat sederhana. Belum ada papan nama permanen yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pondok pesantren. Di bagian depan terdapat sebuah rangka bangunan yang rencananya akan dijadikan masjid. Rangka tersebut berdiri tanpa atap dan belum dapat difungsikan sama sekali, karena masih menunggu donatur.' Memang, pembangunan masjid tersebut, seperti halnya pembangunan masjid di beberapa tempat yang lain di pelosok Indonesia, banyak yang

'istirahat' dahulu alias dihentikan sementara karena tidak cukup dana. Tanahnya berasal dari wakaf warga atau sebuah keluarga di daerah setempat yang sudah pada bekerja di kota. Kegiatan peribadatan pun dilakukan di sebuah ruang kosong di belakang kantor administrasi pondok yang sejatinya berfungsi sebagai gudang peralatan Marching Band zaman *baheula*. Pondokan untuk putra dan putri terpisah. Pondokan untuk santri putri berada di lokasi dekat madrasah Tsanawiyah, sementara untuk putra berdiri sendiri sekitar beberapa ratus meter.

Inti dari pesantren adalah kyai, masjid, dan pondok. Namun, di pondok pesantren Darul Ulum ini, masjid belum dapat difungsikan dan hanya 'menyulap' ruang kosong berukuran sekitar 4x6 sebagai tempat solat berjamaah sementara. Ruang asrama pun belum begitu permanen dan penataan lokasi bangunan juga minimalis. Penataan ruangan belum dilakukan dengan baik, karena adanya keterbatasan bangunan dan belum didirikannya sarana pendukung yang lain. Para santri belajar pada sore dan malam hari di pelataran atau teras asrama dengan menggelar tikar. Dinding asrama bagian luar juga dipasang sebuah *whiteboard* kecil untuk belajar para santri. Pengurus pondok mengilustrasikan bahwa ini dilakukan karena kondisi 'darurat'. Di musim panas/kemarau, kondisi semacam ini tidak menjadi masalah besar baik bagi santri maupun pengasuh, tetapi bila musim hujan tiba kadang belajar di teras asrama menjadi masalah juga karena suasananya menjadi tidak kondusif untuk belajar. Pada pagi hari, sore dan malam santri belajar di pondok, sementara siang harinya mereka belajar di madrasah (Aliyah, SMKN, atau Tsanawiyah).

Beberapa lokal bangunan difungsikan

untuk praktik sekolah SMKN kelas jauh. Hal itu dilakukan karena di madrasah yang salah satu ruangnya digunakan untuk SMKN Kelas Jauh itu belum tersedia bangunan yang dapat digunakan untuk ruang praktik siswa yang belajar teknik otomotif. Alhasil, pihak yayasan menggunakan salah satu ruangan di pondok tersebut untuk ruang praktik siswa. Pesantren ini dijanjikan oleh pemerintah untuk dibangun gedung sebagai konsekuensi dari kerjasama yang mereka lakukan dalam menyelenggarakan SMKN kelas jauh, namun karena realisasinya belum juga terlihat, akhirnya ruang praktik atau bengkel otomotif itu menggunakan fasilitas asrama pondok. Padahal, pihak pondok pesantren sendiri sudah menyediakan lahan khusus untuk pembangunan gedung yang dijanjikan pemerintah dari 3500 meter lahan yang mereka miliki.

SMKN kelas jauh ini merupakan hasil dari kerjasama antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat dan SMK Pengasih. Beberapa mata pelajaran Umum dan Dasar diampu oleh guru di sekolah setempat, sementara untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan, guru-guru didatangkan dari sekolah negeri. Penyelenggaraan sekolah kejuruan oleh madrasah atau pesantren tersebut memang bukan tanpa alasan strategis. Kecenderungan yang berkembang dikalangan remaja dan anak sekolah di desa tersebut adalah melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi di Sekolah Kejuruan. Menurut salah seorang guru, pada tahun-tahun sebelumnya Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum dapat meluluskan sekitar 40 sampai 50 siswa. Namun hanya sekitar empat orang saja atau lima yang melanjutkan studi di Madrasah Aliyah. Ada beberapa sebab, antara lain:

masalah motivasi siswa yang lebih cenderung memilih sekolah kejuruan ketimbang sekolah Aliyah; kedua, lulusan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum juga lebih memilih sekolah negeri. Kerjasama yang dibangun oleh Yayasan dan Dinas atau SMU Pengasih diharapkan dapat menguntungkan dua pihak: pihak sekolah dapat menampung lebih banyak siswa dan suasana sekolah lebih meriah; kehadiran siswa-siswa SMK tersebut juga menambah jumlah santri karena sebagian siswa SMK tersebut mondok di pesantren Darul Ulum.

Bangunan pondok pesantren yang belum sempurna itu dibangun dengan melibatkan partisipasi warga. Keterbatasan pihak pondok dalam menyediakan dana yang cukup telah terbantu oleh partisipasi warga setempat. Untuk membangun pondok Darul Ulum, warga berbondong-bondong ikut menyumbangkan tenaga. Beberapa bahan bangunan juga berasal dari warga, ada yang menyumbangkan batang pohon kelapa untuk dijadikan sebagai *usuk* atap bangunan, menyumbang tenaga untuk mengumpulkan batu-batu, dan juga menyumbang pasir. Kohesi sosial yang lebih lekat dalam masyarakat pedesaan memang sangat memungkinkan adanya partisipasi warga lebih banyak, setidaknya dalam menyumbangkan tenaga. Meski memiliki banyak keterbatasan dari segi pendanaan, pondok pesantren ini hanya menarik biaya dari keluarga yang mampu saja. Total biaya per orang yang dibutuhkan untuk menyediakan konsumsi perbulan para santri adalah Rp. 150 ribu/orang, sementara untuk tinggal di asrama para santri tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Meski demikian, dalam faktanya, hanya sebagian santri saja yang dapat membayar penuh, sebagian lain

membayar semampunya, dan sebagian lain tidak dipungut biaya. Menurut pengasuh pondok ini, sebagaimana diutarakan sebelumnya, sebagian santri yang tinggal ini adalah anak yatim atau yatim piatu.

Persoalan yang sama tidak hanya dihadapi oleh pihak pondok, tetapi juga oleh sekolah-sekolah yang dibawah oleh yayasan tersebut. Banyak siswa berasal dari kalangan tidak mampu. Salah satu fenomena yang menarik adalah bahwa selain melakukan pencarian dana dari pihak lain, baik pemerintah, donatur yang berasal dari tokoh masyarakat setempat maupun alumni, para guru juga berpartisipasi ikut menyumbang. Para guru yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dianjurkan untuk menyisihkan gaji mereka bagi siswa-siswa yang mereka didik. Setiap bulan, gaji mereka dipotong sekedarnya sesuai dengan kemampuan dan besaran gaji yang mereka terima. Mereka membuat kesepakatan sendiri bahwa mereka menyumbangkan sebagian gaji mereka setiap bulan, berkisar Rp. 25.000 sampai Rp. 100.000. Salah satu guru menyatakan: “meskipun ini (sumbangan) sifatnya anjuran, namun kami tidak tega juga melihat nasib anak-anak didik kami. Karena itulah kami membuat kesepakatan seperti ini agar mereka tetap dapat belajar di sekolah ini.” Sumbangan itu, dinamakan sumbangan OTA atau Orang Tua Asuh. Gerakan seperti ini merupakan komitmen para guru agar lebih banyak siswa yang belajar disini. Bukan hanya para guru, mantan guru yang pernah mengajar di sekolah ini dan alumnus yang pernah belajar di sekolah ini juga ikut menyumbang. Jumlah yang diperoleh dari guru tidak terlalu besar. Dari 42 staff pengajar atau guru yang mendidik siswa di sekolah ini, hanya belasan guru saja yang

sudah diangkat sebagai pegawai negeri. Guru yang mengajar di madrasah ini dikalsifikasikan menjadi 4 tipe: guru yayasan, guru bantu, guru kontrak, dan guru sekarelawan.

Pondok pesantren ini dikelola oleh dua orang pengasuh yang intensif mendampingi para santri, sebut saja Pak Soleh dan Pak Iskandar. Mereka adalah warga setempat yang mengabdikan dirinya untuk pesantren. Salah satu pengasuhnya adalah lulusan sebuah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta. Dia belajar studi Islam atas beasiswa dari Universitas tersebut untuk mendalami bidang Tafsir dan Hadis, dan mengambil Akta IV di Perguruan Tinggi Muhammadiyah lain di Yogyakarta. Salah satu kampus Muhammadiyah di Yogyakarta memiliki relasi yang cukup baik dengan pihak pondok pesantren, karena kerap menyalurkan sebagian dana Zakat, Infak dan Shadaqah melalui pondok ini. LAZIS kampus tersebut rutin menyalurkan dana mereka dengan cara memberikan beasiswa kepada alumni dan santri pondok pesantren ini yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jumlahnya sekitar 10 orang. Mereka bukan saja dapat belajar gratis di tingkat perguruan tinggi, tetapi juga mendapatkan insentif bulanan untuk kebutuhan sehari-hari.

MERANGKUL DONATUR DAN PROBLEMATIKANYA

Bagi sebuah pesantren di pedesaan, melakukan penggalangan dana bukanlah perkara mudah. Hal itu dirasakan oleh pula oleh pesantren yang berada di bawah naungan organisasi sebesar Muhammadiyah. Apalagi bila pesantren tersebut belum memiliki jaringan yang kuat yang dapat mengakses sumber-sumber prekonomian

yang berbasis di perkotaan. Pesantren Darul Ulum pun mengalami hal serupa, memiliki keterbatasan dana dan juga akses terhadap sumber perekonomian yang dapat menunjang proses belajar mengajar dan proses pendidikan secara lebih baik. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa upaya-upaya untuk menggalang dana tidak dilakukan. Faktanya, yayasan dan pesantren ini memiliki kiat-kiat tersendiri. Pesantren ini, sebagaimana diutarakan sebelumnya, memperoleh sumbangan yang berasal dari iuran bulanan santri, sumbangan masyarakat, dan hasil usaha mandiri untuk menunjang biaya operasional yang dibutuhkan. Untuk sebuah pesantren di pedesaan yang pendanaannya disandarkan kepada kontribusi para donatur tentu memerlukan strategi khusus, terutama dalam menjaga sustainability kontribusi para donatur. Sejak tahun 1980-an Pesantren Darul Ulum menyelenggarakan pengajian rutin, yang dimaksudkan untuk menjaga hubungan harmonis, intensif dan berkelanjutan antara institusi tersebut dengan jamaah Muslim, simpatisan Muhammadiyah dan donator umum lainnya. Salah satu kegiatan yang sampai saat ini masih berjalan adalah Pengajian Ahad Pagi. Masyarakat cukup antusias dalam merespons kegiatan pengajian tersebut. Hal itu terlihat dari jumlah jamaah yang hadir, yang ternyata tidak hanya dari masyarakat sekitar Sewugalur, tetapi juga dari desa-desa lain di Kabupaten Kulonprogo, dan bahkan ada pula yang berasal dari luar Kabupaten Kulonprogo.⁹

Pengajian adalah media sangat penting bagi pondok pesantren ini untuk memelihara jaringan dengan donatur. Jumlah pesertanya cukup banyak, meskipun tidak selalu konsisten. Di bulan Ramadhan jamaah

pengajian ini dapat mencapai 400-700 orang. Pengajian Ahad Pagi ini biasanya dimulai pada pukul 06.00-07.00 pagi WIB. Biasanya isi dari pengajian tersebut membahas tafsir al-Qur'an. Pada setiap pengajian, pihak pondok mengedarkan "kotak amal" atau "kencleng". Kotak Amal tersebut tidak satu jenis, tetapi terdiri dari beberapa kotak yang menunjukkan peruntukan dana yang diterima sehingga jamaah pengajian dapat menyumbang sesuai dengan hasrat mereka. Misalnya, ada kotak khusus untuk infak untuk kegiatan pengajian tersebut, kotak khusus untuk pembangunan, dan kotak khusus untuk yatim dan dhu'afa. Dengan cara-cara seperti itulah pesantren ini dapat bertahan. Karena itu pula pesantren ini mau menerima santri bagaimanapun kondisi sosial dan ekonominya.

Jamil Wahid, direktur pesantren Darul Ulum, menceritakan bahwa pesantrennya tidak serta merta menerima wakaf dari masyarakat tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, terutama latar belakang dari pewakaf. Ada sebuah keluarga yang mewakafkan harta milik mereka dan mereka memang berasal dari keluarga berada. Ia mengisahkan, pernah pula suatu kali seseorang menyerahkan lahan atau barang miliknya untuk digunakan demi kepentingan Darul Ulum, namun karena pihak pesantren menyadari bahwa kondisi ekonomi orang tersebut tidak sebagik waktu-waktu sebelumnya, maka pihak pondok pun menggantinya (dengan barang lain). Selain wakaf barang atau lahan, beberapa keluarga secara kolektif lebih cenderung memberikan wakaf tunai, misalnya ada seseorang yang menitipkan uang sebesar Rp. 25 Juta lebih untuk keperluan pondok, dan beberapa waktu sebelum itu, ada pula yang menitipkan

uang lebih dari Rp. 30 juta rupiah untuk tujuan yang sama.¹⁰ Selain bantuan dari masyarakat setempat, pesantren ini juga mendapat sumbangan dari beberapa donatur luar negeri.

Paska tragedi 11 September dimana serangan teroris mengguncang dunia, terutama setelah penghancuran gedung World Trade Center di New York, masalah derma berbasis agama di kalangan Muslim mendapat perhatian negara-negara Barat, terutama Amerika. Aktivitas-aktivitas kedermawanan di negara-negara Muslim, baik di negara-negara Timur Tengah maupun di Asia Tenggara, sering dicurigai terkait dengan isu-isu terorisme. Hal itu merupakan fenomena global yang tidak hanya dirasakan oleh organisasi keagamaan di Indonesia yang biasa mendapatkan bantuan dari Timur Tengah, tetapi juga oleh organisasi-organisasi Islam yang berada di seluruh dunia.¹¹ Bahkan, harta yang berasal dari zakat, infak dan shadaqah tidak jarang menjadi bahan kecurigaan. Yayasan-yayasan dari Timur Tengah yang sering mengucurkan dana ke Indonesia baik untuk mengembangkan pendidikan keagamaan, pembangunan masjid atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya, tak pelak kena imbasnya. Fenomena tersebut nampaknya dialami oleh Pesantren Darul Ulum. Beberapa tahun sebelumnya, umpamanya, pesantren ini dijanjikan untuk mendapatkan sumbangan dari sebuah yayasan dari Timur Tengah. Yayasan tersebut sudah terbiasa mengirimkan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia, utamanya pesantren. Bantuan diberikan secara bertahap. Pada awalnya, Darul Ulum dijanjikan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 110 juta. Namun seiring dengan isu-isu terorisme, dan pengiriman

yang dilakukan menjadi lebih sulit dari biasanya, baru direalisasikan sekitar Rp 70 juta saja. Persoalan tidak berhenti sampai di situ karena selama isu terorisme terus menghiasi media massa nasional dan internasional, selama itu pula ketidakpastian bantuan dari donatur negara-negara Timur Tengah terus berkurang.

Cara lain yang digunakan pesantren untuk mendapatkan dana adalah dengan menyewakan sawah atau lahan pertanian lainnya. Pesantren ini memiliki beberapa tanah wakaf dan tanah hasil pembelian di beberapa tempat. Sebagian lahan tersebut disewakan kepada para petani setempat. Lahan lainnya hanya ditanami kelapa dan pohon jati yang memang hasilnya tidak bisa secara rutin atau langsung dirasakan saat ini, tetapi jangka panjang. Saat ini, pesantren ini masih bersandarkan pada penghasilan rutin dari warung dan pemanfaatan sawah atau tanah yang keuntungannya belum bisa menutupi kegiatan operasional pesantren. Salah satu kelemahan dari sebuah pondok pesantren di pedesaan adalah lemahnya jaringan terhadap sendiri-sendiri perekonomian yang berada di perkotaan. Misalnya membangun jaringan dengan perusahaan-perusahaan atau institusi tertentu yang memiliki komitmen terhadap dunia pendidikan. Bukan hanya itu, kemampuan untuk mengelola atau mengembangkan jenis usaha yang dapat membantu perekonomian pesantren juga sangat terbatas seiring dengan keterbatasan modal dan sumber daya manusia serta keterbatasan akses.

MEMPERTANGGUNG JAWABKAN DANA MASYARAKAT: SEBUAH TIMBAL BALIK

Lembaga pendidikan Darul Ulum ini

merupakan inisiatif masyarakat lokal, terutama beberapa aktivis Muhammadiyah. Meskipun inisiatif pendiriannya berasal dari pribadi seseorang, yaitu Haji Dawam Roji, namun kini sudah berbentuk yayasan, dan merupakan bagian dari amal usaha Muhammadiyah. Haji Dawam Roji, sang pendiri, menyadari bahwa bilamana suatu sata ia meninggal, ia tidak menginginkan lembaga yang didirikannya ikut berhenti beroperasi. Ia menyadari bahwa tidak semua anak-anaknya akan mau melanjutkan kepemimpinannya untuk menjaga sustainabilitas madrasah dan pesantren yang ia dirikan. Oleh karena itu, akhirnya ia memutuskan untuk menggabungkan institusi ini dengan Muhammadiyah. Ternyata, langkah yang dilakukan Haji Dawam Roji, tidak sia-sia, karena dengan berafiliasi kepada organisasi keislaman seperti Muhammadiyah, lembaga ini dapat mencari 'dana talangan' melalui Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk keperluan-keperluan yang mendesak. Belakangan ini, pesantren Darul Ulum mampu mengumpulkan sejumlah dana dari warga dan donatur, yang sebagian dari dana itu akan digunakan untuk melunasi 'pinjaman' kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta.

Meski kemampuan melakukan penggalangan dana yang dilakukan oleh pesantren yang berada di pedesaan seperti Darul Ulum relatif baik, meski tidak terlalu istimewa, para pengurus menyadari bahwa 'ketergantungan' kepada masyarakat ini juga menyebabkan institusi ini belum dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Kendati demikian, mereka mencoba terbuka dan memegang prinsip *accountability* dengan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperoleh dari masyarakat kepada

masyarakat. Dikatakan demikian oleh seorang pengurus:

Selama ini kami melihat pesantren masih tergantung pada masyarakat. (Kita) belum mampu untuk menghidupi masyarakat. Ketika kita butuh apa-apa selalu minta pada masyarakat. Ini yang menjadi persoalan utama disini. Kedua, karena masih tergantung pada masyarakat maka ketika ada kasus-kasus yang melibatkan personalia tertentu maka masyarakat menjadi turun keyakinan dan kepercayaannya kepada pesantren. Sekecil apapun harus kita pertanggungjawabkan. Infaq shadaqoh dan sebagainya kita laporkan semuanya kepada masyarakat termasuk nama-nama pendermanya sekalian mereka mengecek nama mereka sudah masuk apa belum disitu.

Jelas unsur *trust* atau kepercayaan begitu penting di sini. Apalagi di pedesaan yang masyarakatnya masih peduli dan jumlahnya masih kecil. Sehingga, bila ada penyimpangan akan berakibat fatal. Upaya untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat dilakukan sedemikian rupa, bukan hanya mencoba terbuka dari segi keuangan, tapi juga dalam hal-hal lain yang dapat mengakibatkan munculnya resistensi dari warga sekitar, misalnya politik. Tak dipungkiri dalam dua dasawarsa terakhir pasca reformasi, berdirinya partai-partai politik telah merambah ke pedesaan dan memunculkan dinamika tersendiri di kalangan pesantren.¹² Alih-alih memberikan kontribusi yang berarti, masuknya partai politik ke pesantren juga lebih banyak kontraproduktif sebab pilihan politik masyarakat sangat beragam. Hal ini juga sempat dialami oleh pesantren Darul Ulum ketika ada salah satu pengurusnya masuk dan aktif di partai tertentu. Hal itu kemudian

coba diantisipasi oleh pengurus lainnya dengan mengingatkan pengurus yang aktif di partai politik untuk tidak membawa simbol-simbol dan misi partai ke pesantren.

Sikap saling percaya yang tumbuh di antara pesantren dan lingkungan sekitarnya akan meningkatkan efektifitas komunikasi yang dibangun oleh keduanya, dan pada gilirannya proses timbalbalik antara pesantren dan warga dapat berjalan. Sudarta, Lurah Karang Sewu, menunjukkan apresiasi yang baik terhadap keberadaan pesantren ini. Ia menyatakan bahwa warga di sekitar pesantren merasa sangat terbantu, apalagi pesantren ini bukan ditujukan bukan bagi kalangan orang-orang berpunya, melainkan bagi mereka yang latar belakang sosial dan ekonominya kurang. Sudarta bahkan menyebut pesantren ‘lebih berlatarbelakang sosial’, artinya bukan sekedar sekolah komersial. “Mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki biaya melanjutkan sekolahnya ke Darul Ulum”, ujarnya. Harapan warga Karang Sewu terhadap keberadaan pesantren ini pun tidak terlalu muluk. Keterlibatan pesantren dalam pembinaan keagamaan warga setempat saja merupakan sebuah kontribusi yang sangat berharga. Begitu pula dengan pengajian rutin mingguan seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya, mendapat penghargaan yang baik karena dipandang memberikan manfaat yang banyak.

...mereka kan memiliki pondok-pondok pesantren dan yatim piatu. Ini menjadi salah satu wadah untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan anaknya. Khusus dalam meningkatkan dalam bidang agama, setiap ahad pagi secara rutin diadakan pengajian dari jam 06.00 – 07.00 WIB dan disitu juga

para peserta pengajian dengan kesadaran sendiri-sendiri memberikan infaq. Infaq itu kemudian disalurkan ke, TK, SD, SMP, Masjid dan tempat lain secara bergiliran. Juga perayaan hari Idul Fitri dan Idul Adha, ada pengumpulan dana infaq yang kemudian dihitung dan disampaikan berapa jumlahnya dan langsung dibagi dan disalurkan berapa yang akan diberikan dan ke siapa saja. Hal ini sudah terjadi sejak dulu sekali bahkan ketika saya masih kecil. Disini juga terkenal karena kompleknya tokoh-tokoh besar agama seperti Bapak H. Dawam pak AR Fakhruddin dan sebagainya.¹³

Pengajian mingguan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum mampu menghadirkan berbagai kalangan masyarakat yang berada di luar daerah Karangsewu. Para peserta pengajian datang tidak hanya secara individu, tetapi banyak dari mereka yang datang secara rombongan dengan menggunakan bis ataupun kendaraan pribadi, mobil dan sepeda motor. Mereka datang tidak hanya berniat untuk mendengarkan isi materi pengajian yang disampaikan oleh ustadz dari Pesantren Darul Ulum, melainkan juga untuk berinfaq. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, pesantren ini juga menjadi ‘amil pengelola dan sekaligus penerima dana ZISWAF. Menurut Sudarta, masyarakat menyalurkan dana ZISWAF mereka melalui pondok ini, dan tidak mengelola sendiri melalui panitia tertentu. Tidak hanya Sudarta, seorang Ibu warga setempat, juga menyampaikan hal yang sama, merasakan manfaat dari kehadiran pesantren ini, terutama dari sisi keagamaan dan sosial. Secara keagamaan, masyarakat ‘tersantuni’ karena pengajian-pengajian yang diselenggarakan pesantren. Secara sosial,

pengajian tersebut juga menumbuhkan relasi yang lebih harmonis antara pesantren dan masyarakat. Apalagi, pesantren juga kerap menyalurkan bantuan kepada anak-anak yatim yang tidak hanya mondok di pesantren tersebut, tetapi juga di kalangan warga sekitar.¹⁴

Dengan pola yang digunakan, Pesantren Darul Ulum, setidaknya dimata warga, telah menunjukkan sebuah tanggung jawab sosial yang sesuai dengan kemampuannya. Keterbatasan yang dimiliki pesantren dari segi penguatan ekonomi diimbangi dengan komitmen yang cukup kuat untuk tetap dapat berintegrasi dengan masyarakat. Yang menarik adalah bahwa ciri atau tipikal pondok pesantren di pedesaan relatif berbeda dengan pesantren modern di perkotaan seperti dibahas pada bagian berikutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa filantropi Islam berbasis pesantren adalah sebuah hal yang niscaya. Sesuai dengan definisi-definisi filantropi yang ada, sebuah pesantren dapat mengekspresikan kegiatan filantropinya pertama-tama melalui komitmen sosial yang dimilikinya. Komitmen sosial adalah unsur terpenting dari filantropi, baik itu dimotivasi oleh faktor keagamaan ataupun non keagamaan. Dari komitmen sosial tersebut baru dapat dilihat apakah dampak yang diperoleh dimasyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Sebagai pesantren yang ‘multifungsi’ seperti Darul Ulum, gerakan filantropi yang dilakukan memang tidak memiliki dampak besar secara ekonomi, namun justru karena itu pula pihak pesantren menginisiasi cara lain, yaitu berbagi hasil kegiatan fundraisingnya dengan warga sekitar, meski secara nominal jumlahnya tidak besar. Prinsip “*small is beautiful*” nampaknya berlaku di sini.

KESIMPULAN

Di Indonesia, semenjak dulu, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mempunyai fungsi ganda ; menyelenggarakan pendidikan sekaligus menjadi pengayom masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren berfungsi mentransformasikan pengetahuan Islam kepada peserta didik baik secara formal maupun informal. Di kompleks pesantren, figur kyai, pengasuh, ustadz adalah sentral dalam memberikan keteladanan hidup. Di kelas-kelas formal, transformasi pengetahuan dan keilmuan itu berlangsung. Sebagai pengayom masyarakat, pesantren mempunyai tanggung jawab sosial dan keagamaan. Pesantren menjadi tempat rujukan bagi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam masalah-masalah keagamaan. Oleh masyarakat, pesantren dianggap sebagai *spiritual guide* sekaligus *cultural broker*, lembaga pencerah bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan persoalan-persoalan ekonomi di masyarakat, pesantren juga dituntut berperan sebagai lembaga pemberdaya dan penguat ekonomi masyarakat. Tanggung jawab sosial, keagamaan, budaya dan ekonomi yang harus diemban sebuah pesantren tidak bisa dilepaskan dari konsep bahwa pesantren adalah sebuah lembaga penyelenggara pendidikan berbasis komunitas. Artinya, pesantren dari rakyat dan untuk rakyat.

Pesantren di pedesaan masih mempertahankan karakter populisnya: berdiri di tengah-tengah perkampungan penduduk tanpa pagar beton yang memisahkan “denyut nadi pesantren” dengan masyarakat. Hubungan pesantren dengan penduduk setempat berjalan dengan harmonis, karena kedua belah pihak merasa

menjadi bagian satu sama lain. Pesantren menyediakan dirinya menjadi rujukan spiritual masyarakat. Masyarakatpun berpartisipasi dan mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pesantren dengan menyumbangkan harta dan tenaga. Kepedulian dan partisipasi masyarakat pada pesantren diwujudkan, antara lain, dalam bentuk penyaluran dana ZIS dan wakaf yang pengelolaannya dipercayakan kepada pesantren. Pesantren memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan ZISWAF tersebut kepada yang membutuhkan, misalnya peserta anak-anak kurang mampu yang sekolah di lembaga tersebut atau untuk pengembangan sarana dan prasarana pesantren. Dengan demikian, pesantren yang berada di pedesaan sebagaimana Pesantren Darul Ulum Galur memiliki tingkat kohesivitas yang kuat dengan masyarakat. Di pesantren ini, kegiatan filantropi dari dan untuk masyarakat yang dikelola pesantren berjalan dengan baik dan berkembang menjadi kegiatan yang memberdayakan kelompok yang membutuhkan. Disebut “memberdayakan”, karena dana ZISWAF dikelola dan disalurkan untuk proyek-proyek filantropi yang bersifat produktif, bukan bersifat konsumtif karitatif, seperti beasiswa atau santunan pendidikan bagi anak fakir, miskin, dan yatim piatu, dan pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan pertanian yang diserahkan kepada petani kurang mampu.

Sebenarnya, pesantren bukan hanya berfungsi sebagai lembaga edukatif, tetapi juga sebagai pilar kekuatan sosial dan ekonomi umat melalui kegiatan pembinaan atau pendampingan sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, pesantren mempunyai tanggung jawab moral, sosial dan ekonomi

pada masyarakat. Pesantren yang memiliki semangat pemberdayaannya merupakan salah satu contoh konkret dari sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya berkonsentrasi dalam pengembangan keilmuan Islam, tetapi juga merupakan lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Pesantren bukan hanya ditantang untuk mereproduksi manusia-manusia bermoral yang cerdas serta patriotik sebagai pengejawantahan iman dan takwa, tetapi juga menciptakan manusia yang mandiri dan peduli kepada kebutuhan dan problem masyarakat. Idealitas inilah yang hendak diwujudkan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum Galur Kulonprogo. Meskipun secara finansial, pesantren di pedesaan ini memiliki berbagai macam kendala dan keterbatasan, tetapi semangat pengabdian dan pemberdayaan pada masyarakat begitu tinggi. Pesantren membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan sebaliknya masyarakatpun merasa mendapatkan ‘pengayoman spiritual’ dari masyarakat sekitar.

Karena itulah, setiap kegiatan yang diinisiasi oleh pesantren ini dapat tetap berjalan dengan lancar, karena mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar baik secara moral maupun materil. Meskipun demikian, karena dukungan dari masyarakat yang berlimpah inilah, pesantren tidak mempunyai kecakapan untuk mandiri secara keuangan (*self financing*). Pesantren masih mengandalkan pada “manajemen saling percaya”, yang tentu saja sangat beresiko. Jika misalnya, pesantren mencederai kepercayaan (*trust*) masyarakat, maka dukungan dana dari masyarakat akan berhenti, dan akibatnya, masalah finansial serta keberlanjutan program menjadi terganggu.

CATATAN AKHIR

- ¹ Lebih jauh tentang dinamika pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan, lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta: LP3ES (1986); Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. (Jakarta: INIS, 1994); Dawan Rahardjo (ed.), *Pergumulan Dunia Pesantren*. (Jakarta: P3M, 1983)
- ² Lihat Kuntowijoyo, "Peranan Pesantren dalam Pembangunan Desa," dalam *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. (Bandung: Mizan, 1993), h. 16; juga Hadimulyo, "Dua Pesantren, Dua Wajah Budaya," dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah*, (Jakarta: LP3ES (1985), h. 99; M. Dawam Rahardjo, "Pesantren dan Pembaharuan," dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, h. 6.
- ³ Zamachsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 44.
- ⁴ Manfred Ziemek, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1986), h. 138; lihat juga penjelasan Martin van Bruinessen tentang peta konflik kiai dalam pelbagai forum di tubuh NU, yang menunjukkan 'independensi' mereka maupun kharismanya, dalam *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKIS, 1994)
- ⁵ Lily Zakiyah Munir, "Pesantren dan Strategi Pengentasan Kemiskinan," *Al-Wasathiyah*, Vol. III, No. 14. (2008), h. 9-13.
- ⁶ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Essai-essai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), h. 196-7. Tulisan Gus Dur tersebut bisa juga dilihat dalam "Paradigma Pengembangan Masyarakat Melalui Pesantren", *Jurnal Pesantren*. Vol. V. No. 3. (1998)
- ⁷ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi...*, h. 64.
- ⁸ Mengenai perkembangan filantropi Islam di Indonesia, lihat Andi Agung Prihatna dkk, *Muslim Philanthropy: Potential and Reality of Zakat in Indonesia*, (Jakarta: PIRAMEDIA, 2005); Chaeder S. Bamualim dkk., *Islamic Philanthropy & Social Justice*, (Jakarta: CSRC dan Ford Foundation, 2006); dan Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktik Kedermawanan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Ford Foundation dan Pirac, 2004).
- ⁹ Lihat Martin Abbas Satria, "Tanggapan Jamaah terhadap Pengajian Ahad Pagi Pondok Pesantren Darul Ulum Muhammadiyah di Kabupaten Kulonprogo", *Skripsi*, Fakultas Dakwah, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006), h. 39.
- ¹⁰ Wawancara oleh tim peneliti dengan Jamil Wahid, Direktur Pondok Pesantren Darul Ulum, Agustus 2008.
- ¹¹ Lihat misalnya J. Millard Burr and Robert O. Collins, *Alms for Jihad: Charity and Terrorism in the Islamic World*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007)
- ¹² Lihat misalnya Hilman Latief, "Pergulatan Politik Pesantren di Era Multipartai: Studi Kasus di Kampung

- Mlangi", *Afkaruna: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 2. No. 1. Januari-Juni (2004), h. 72-103.
- ¹³ Wawancara oleh tim peneliti dengan Sudarta, Lurak Karangsewu, Agustus 2008.
- ¹⁴ Wawancara oleh tim peneliti dengan Ibu Suhartina, warga sekitar pesantren Darul Ulum, Agustus 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Bamualim, Chaeder S. et al., 2006. *Islamic Philanthropy & Social Justice*, Jakarta: CSRC dan Ford Foundation
- Bruinessen, Martin van. 1994. *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIS
- Burr, J. Millard and Robert O. Collins. 2007. *Alms for Jihad: Charity and Terrorism in the Islamic World*. Cambridge: Cambridge University Pres.
- Dhofier, Zamachsyari. 1982. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES
- Hadimulyo, "Dua Pesantren, Dua Wajah Budaya," dalam M. Dawam Rahardjo (ed.). 1985. *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah*. Jakarta: LP3ES
- Kuntowijoyo, 1993. "Peranan Pesantren dalam Pembangunan Desa," dalam *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan
- Latief, Hilman. 2004. "Pergulatan Politik Pesantren di Era Multipartai: Studi Kasus di Kampung Mlangi", *Afkaruna: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 2. No. 1, Januari-Juni
- Mastuhu, 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS
- Munir, Lily Zakiyah. 2008. "Pesantren dan Strategi Pengentasan Kemiskinan," *Al-Wasathiyah*, Vol. III, No. 14
- Prihatna, Andi Agung et al., 2005. *Muslim Philanthropy: Potential and Reality of Zakat in Indonesia*. Jakarta: Piramedia
- Rahardjo, M. Dawan. (ed.). 1983. *Pergumulan Dunia Pesantren*. Jakarta: P3M
- , "Pesantren dan Pembaharuan," dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergumulan Dunia Pesantren*. Jakarta: P3M
- Saidi, Zaim dan Hamid Abidin, 2004. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktik Kedermawanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Ford Foundation dan Pirac
- Satria, Martin Abbas. 2006. "Tanggapan Jamaah terhadap Pengajian Ahad Pagi Pondok Pesantren Darul Ulum Muhammadiyah di Kabupaten Kulonprogo." *Skripsi*. Fakultas Dakwah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Steenbrink, Karel A. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES
- Wahid, Abdurrahman. 2010. *Menggerakkan Tradisi: Essai-essai Pesantren*. Yogyakarta: LKIS
- Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M